

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, F. (2023). Etika profesi notaris dalam penerapan akta elektronik. *Jurnal Etika Profesi*, 3(2), 250–265.
- Ainun Najib (2023). Artikel "Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi" yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ACTA*
- Akbar, D. I., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan cyber notary di masa perkembangan teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).
- Amiruddin, A., & Haris, T. (2022). Analisis hukum cyber notary pada sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(3), 215–230.
- Andriani, D., Sitorus, W., Maskun, & Pati, S. (2025). *Legal Protection of Electronic Storage of Notary Protocols. Science of Law*, 2025(1), 7– 12.
- Arsyad, N., & Susanto, R. (2022). Akta elektronik dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Internasional Hukum Digital*, 7(2), 95–108.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *AlQisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Bahri, Yahanan, & Trisaka (2019). Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 243-259.
- Bambang Soesatyo (2025) Dalam pernyataannya, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital dalam praktik notaris.
- Basri, H., & Aditya, P. (2023). Perlindungan hukum dalam penggunaan dokumen elektronik. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 9(3), 145–160.
- Bayumurti, K., Perdana, N., & Tjandra, R. S. (2025). Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17.
- Darmawan, H., & Putri, A. R. (2020). Digitalisasi akta notaris: Tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Hukum*, 6(2), 245–258.
- Dustin, B., & Firmansyah, H. (2023). Analisis keberadaan senjata airsoft gun dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. *Syntax Literate*:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(11), 6347–6360.

- Dwitriani, A., Ayundari, A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap etika profesionalisme notaris. *UNES Law Review*, 6(2), 4718–4730.
- Fadillah, Y., & Subandi, M. (2021). Keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 205–215.
- Fauzi, A. M., & Rahayu, S. (2021). Regulasi tanda tangan digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 145–160.
- Gunawan, R., & Putra, I. (2019). Konsekuensi hukum cyber notary dalam era digitalisasi. *Jurnal Hukum Teknologi*, 4(3), 180–192.
- Hasbullah, F., & Asyari, T. (2023). Analisis yuridis pembuatan akta elektronik melalui pendekatan cyber notary. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(4), 450–468.
- Hermanto, Y. (2020). Peran teknologi dalam sistem hukum kenotariatan. *Jurnal Sistem Hukum*, 5(2), 120–130.
- Hermawan, Y., & Yuliana, A. (2023). Keamanan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Cyber Notary. *Jurnal Keamanan Informasi dan Teknologi*, 12(2), 45–56.
- Huda, M. (2021). Transformasi Digital di Bidang Kenotariatan: Menyongsong Era CyberNotary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(2), 123–135.
- Humiati, H. (2020). Komentar terhadap hukum dan masyarakat dalam pemikiran John Austin, H. L. A. Hart, dan Hans Kelsen. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3 (1).
- Ikrasari, R. (2024). *Legal Protection of Notaries in Document Validation through Electronic Systems*. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 4975–4982.
- Judhariksawan. (2019). Terrorism and cyberspace: A phenomenon of cyber- terrorism as transnational crimes. *FIAT JUSTISIA*, 13(4), 333.
- Khairuddin, M. (2023). *Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Perspektif teori kepastian hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1051–1059.
- Kurniawan, D. (2018). Peran Media Elektronik dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(3), 200–213.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2001). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, F., & Nugraha, A. (2023). Validitas akta elektronik dalam praktik hukum

- notaris. *Jurnal Kajian Kenotariatan*, 5(1), 123–134.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Mariyanawati, Y. A., & Adjie, H. (2022). Keabsahan akta otentik yang dibuat dengan cara elektronik (Cyber Notary). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 27(1), 42–48.
- Mekka Putra, M. F., & Alkatiri, K. (2023). *A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era*. *Jambura Law Review*, 5(2), 332–355.
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36–47.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad Ricky Ilham Chalid (2022 Dalam artikel "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0" yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Mulyadi, R., & Kartika, S. (2021). Peran notaris dalam era digital. *Jurnal Studi Kenotariatan*, 3(1), 125–138.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Nahrowi, D. (2023). The limited liability of shareholders individual company in legal perspective. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 582–592.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (1997). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nola, L. F. (2016). Peluang penerapan cyber notary dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 75–101.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Panca O. Hadi Putra, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Irwan Santosa (2025) Dalam studi berjudul "A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia" yang diterbitkan dalam *International Journal on Informatics Visualization*.
- Paputungan, A. P., Tumuhulawa, A., & Ismail, N. (2023). Peran pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*,

1(1), 40–50.

- Prasetyo, T. (2023). Pengembangan cyber notary di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Perspektif Hukum*, 10(1), 123–138.
- Pratama, M. (2023). Cyber Notary dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*.
- Rahman, A. R. (2019). Peran notaris dalam pelaksanaan transaksi elektronik. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan*, 3(1), 47–58.
- Rasyid, I., & Lubis, M. (2020). Implikasi hukum penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 190–202.
- Rezky Aulia Yusuf (2021) Dalam tesisnya yang berjudul "Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan" yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 8(1), 123-140.
- Sakharina, I. K., et al. (2019). Role of notary public in increasing the ease of doing business index through the apostille convention. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 1.
- Sakti, F. T. (2020). *Sistem administrasi negara Indonesia* (Unpublished undergraduate thesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Santoso, B. A., & Lestari, R. (2022). Aspek hukum cyber notary dalam mendukung reformasi birokrasi. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(4), 305–318.
- Saputra, R., & Widya, L. (2020). Keabsahan tanda tangan digital pada akta elektronik. *Jurnal Teknologi Hukum*, 2(1), 90–105.
- Satria, F. A. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Badan Siregar, E., & Yusuf, A. (2021). Cyber notary dan dampaknya terhadap praktik hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(3), 320–334.
- Situmorang, L., & Agustina, Y. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Praktik Kenotariatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Informasi Digital*, 15(2), 87-102.
- Smith, J. & Martinez, C. (2019). Digital Notaries and the Future of Electronic Signature in Legal Systems. *International Journal of Law and Technology*, 22(4), 357-368.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sujanoko, G. (2024). Problematika Penerapan Cyber Notary dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia. Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Supanji, J., & Adjie, H. (2023). *The Position of Digital Signatures in Notarial Practice According to the Principle of Tabelionis Officium Fideliter Exercebo*. *UNES Law Review*, 6(1)
- Surya, D. M. (2018). Pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan asas keadilan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 169.
- Suryani, A., & Prasetyo, B. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Akta Elektronik: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Digitalisasi*, 11(1), 45-59.
- Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran hukum: Teori dan metode*. Jakarta: Sinar Grafika & Bumi Aksara.
- Syamsuddin, F. (2021). Tantangan cyber notary dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 78–93.
- Usaha Milik Daerah Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 155–170.
- Wahyuni, S. (2018). Aspek hukum pengesahan akta elektronik dalam konteks perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 3(1), 60–72.
- Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri (2025) Dalam artikel berjudul "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" yang diterbitkan dalam Notaire.
- Wati, D. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari asas kepastian hukum (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 2(1).
- Wibowo, A. M. (1999). *Kerangka hukum digital signature dalam electronic commerce*. Jakarta: Pasca Sarjana-MT1.
- Widodo, D. A., & Pramono, E. (2023). Implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 6(2), 200–215.
- Yulia, A. (2019). Profesi notaris di era industrialisasi dalam perspektif transendensi Pancasila. *Jurnal Law and Justice*, 4(1), 57.
- Yusril, M., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh teknologi terhadap reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 2(2), 95–110.
- Zulaikha, R., & Widodo, A. (2022). Etika notaris dalam penerapan teknologi informasi. *Jurnal Etika dan Hukum*, 6(3), 175–189.